



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANIFAH DWI NIRWANA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 718986

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.790.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
3. Tanah Seluas 821 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
4. Tanah Seluas 2.152 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
5. Tanah Seluas 731 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
6. Tanah Seluas 102 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
7. Tanah Seluas 227 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
8. Tanah Seluas 2.635 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 256.000.000**

1. LAINNYA, BROMPTON KLASIK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000



2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1,5 ULTIMATE-K 4X2 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. LAINNYA, YAMAHA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	129.556.166
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.187.056.166
III. HUTANG	Rp.	188.425.767
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.998.630.399

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.